

NEWSPAPER

Petugas Lapas Kelas IIB Cilacap Laksanakan Zoom Sosialisasi Pemutakhiran Data Hukdis Melalui Aplikasi SIMWAS

Narsono Son - CILACAP.NEWSPAPER.CO.ID

Jun 21, 2022 - 21:19



Petugas Lapas Kelas IIB Cilacap Laksanakan Zoom Sosialisasi Pemutakhiran Data Hukdis Melalui Aplikasi SIMWAS

CILACAP - Petugas Lapas kelas IIB Cilacap mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Hukuman Disiplin (Hukdis) secara daring via aplikasi Zoom

bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Andap Budhi Revianto). Pelaksanaan giat ini dilakukan di Ruang Rapat Lapas Kelas IIB Cilacap, Selasa (21/06/2022)

Giat yang diadakan oleh Andap Budhi Revianto selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, ini membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pemutakhiran data-data hukuman disiplin (Hukdis) pegawai dengan memanfaatkan media digitalisasi, yaitu melalui aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan (SIMWAS).

"SIMWAS sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka membangun lingkungan kinerja berbasis digitalisasi dan bertujuan untuk mengintegrasikan data-data hasil pengawasan", ungkapnya.

Lanjutnya, Secara umum, aplikasi SIMWAS memiliki 3 manajemen utama, yaitu : Manajemen Hasil Pengawasan Inspektur Jenderal, Manajemen Hasil Pengawasan BPK, BPKP, ORI, dan Manajemen Data Hukuman Disiplin.

Dalam giat sosialisasi ini, Itjen Kemenkumham RI membahas tentang standar operasional penggunaan aplikasi SIMWAS, mulai dari proses penginputan data sampai dengan jenis-jenis kendala yang mungkin terjadi saat penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan (SIMWAS) bersama dengan solusi untuk perbaikan.

"Penggunaan aplikasi SIMWAS sendiri merupakan sebuah terobosan maju yang direalisasikan oleh Inspektur Jenderal kementerian hukum RI. Diharapkan, dengan diberlakukannya aplikasi SIMWAS ini, data kedisiplinan pegawai Lapas Kelas IIB Cilacap akan lebih terstruktur dan tidak terjadi tumpang-tindih antar-data pegawai", tambahnya.

Aplikasi ini akan memudahkan operasional pendataan pegawai sehingga kinerja instansi dapat berjalan lebih efisien dan validasi data akan lebih Terjamin.

(N.Son/***)